**Target Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan Program Regulasi
Kementerian Komunikasi dan Digital**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia	2025
2	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyiaran berbasis Media Satelit	2026
3	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz	2025
4	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	2026
5	Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Spektrum Frekuensi Radio untuk <i>Studio-to-Transmitter Link</i>	2027
6	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Izin Kelas	2025

7	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 3,5 GHz	2027
8	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional	2026
9	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet	2026
10	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia	2026
11	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	2027
12	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran	2025
13	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran	2025

14	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang <i>Integrated Broadcast Broadband (IBB)</i>	2026
15	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Media 5G	2027
16	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui <i>Free-To-Air (FTA)</i> Satelit	2029
17	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	2024: ☒ Telah selesai harmonisasi pada tahun 2024 (akhir Mei); ☒ Menunggu surat selesai harmonisasi; ☒ Ditargetkan pengundangan selesai pada tahun 2024.
18	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Publik	2024: ☒ Sudah diserahkan ke Kumham untuk Harmonisasi (akhir Mei 2024); ☒ Ditargetkan untuk selesai Harmonisasi dan penetapan pada tahun 2024.
19	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penerbit Gim	2024: ☒ Draft awal sudah disusun, finalisasi draft ditargetkan pada bulan Juli 2024; ☒ Ditargetkan sinkronisasi internal Aptika pada bulan Agustus 2024; ☒ Ditargetkan harmonisasi internal di Biro Hukum Kominfo pada bulan September 2024; ☒ Ditargetkan harmonisasi eksternal Kumham pada bulan Oktober 2024.

20	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain	2025: Draf awal sudah selesai, namun masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh terhadap Registri. 2025 Ditargetkan selesai dan penetapan pada tahun 2025.
21	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pusat Data Nasional	2024: ☒ Ditargetkan draft awal disusun pada tahun 2024 ☒ RPM Progsun pembahasan dengan K/L direncanakan pada tahun 2025. 2025: Ditargetkan selesai dan penetapan pada tahun 2025.
22	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2024: ☒ Penyampaian RPM ke Tim Hukum Ditjen Aptika pada bulan Juli 2024; ☒ Ditargetkan sinkronisasi internal Ditjen Aptika pada bulan Agustus 2024; ☒ Harmonisasi Biro Hukum ditargetkan pada bulan Oktober 2024; ☒ Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan pada bulan Desember 2024; 2025: Ditargetkan selesai dan penetapan pada tahun 2025.

23	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	<p>2025: Penyusunan kajian moderasi konten (sekaligus untuk Pasal 40 UU 1/2024)</p> <p>2026: Penyusunan draf</p> <p>2027: Pembahasan dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71)</p>
24	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik	<p>2027: Penyusunan kajian digital id</p> <p>2028: Penyusunan draf</p> <p>2029: Pembahasan dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71)</p>
25	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Kebijakan Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	<p>2025: ☒ Ditargetkan Program regulasi dan pembahasan dengan K/L pada tahun 2025. ☒ Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2025.</p>
26	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi Administratif	<p>2026: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2026.</p>

27	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak	2025: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2025.
28	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (sub Urusan IKP)	2026: Penyusunan kajian/naskah urgensi. 2027: Penyusunan dan penetapan RPM.
29	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas	2024: ☐ Ditargetkan kajian selesai pada tahun 2024. 2025: ☐ Harmonisasi internal dengan Biro Hukum ☐ Harmonisasi eksternal dengan Kementerian Hukum ☐ Pengundangan dan Penetapan
30	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Peta Jalan (Roadmap) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband	2026
31	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	2025: Penyusunan Naskah Urgensi 2026: Penyusunan rancangan dan penetapan RPM.
32	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik	2029: Penyusunan Kajian dan RPM.

33	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	2025: Penyusunan kajian kurikulum dan NU 2026: Penyusunan dan penetapan RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
34	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas	2027: Penyusunan NA/NU Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas 2028: penyusunan dan penetapan RPM Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas *setelah RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ditetapkan
35	Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies	
36	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal	
37	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Layanan komunikasi dan informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas	2025: ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025.
38	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis	2025: Penyusunan Kajian/Naskah Urgensi. 2026: Penyusunan dan penetapan RPM.
39	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Corporate University Kementerian Komunikasi dan Digital	2026

40	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	2025
41	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	2025
42	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2025
43	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2025
44	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran	2025
45	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional	2025
46	Peraturan Menteri tentang Regulasi Tentang Manajemen Jabatan	2027